

Kajian Budaya Atas Kondisi Virtualitas Politik Mutakhir

Oleh: Nurhadi*)

Abstrak: Dunia politik dalam era virtualitas menampilkan dirinya dalam berbagai wujud penampakan: kebenaran, kepalsuan; permukaan, kedalaman; kejujuran, absurditas, esensi, ironi. Diperlukan metafora untuk memahami makna berbagai penampakan politik yang saling bertentangan itu. Makna politik dapat dibentangkan melalui metafora cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang memberikan penerangan, semacam pelita yang mengantarkan manusia guna mendapatkan pencerahan. Pencerahan yang dikemukakan dalam buku ini ditampilkan dari tiga sudut pandang kajian, yakni pembahasan permasalahan politik dari segi *cultural studies*, metode semiotika, dan fenomenologi-hermeneutika. Buku ini merupakan upaya untuk menafsirkan fenomena-fenomena budaya politik—terutama aktor-aktor politik—dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

Kata-kata kunci: virtualitas, metafora, semiotik, fenomenologi-hermeneutika, budaya

1. Pendahuluan

Ketika buku *History of Sexuality* karya Michel Foucault diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Rahayu S. Hidayat, rupanya pihak toko buku kebingungan membuat kategori terhadap buku ini. *Sejarah Seksualitas* itu oleh pengelola toko buku dimasukkan dalam kategori buku-buku seks, bukan pada rak

kajian budaya. Memang tidak mudah membuat kategori terhadap karya-karya Foucault, bahkan terhadap bidang keilmuannya sering kali para komentator menemui kesulitan untuk mengkategorikan pemikir asal Perancis ini ke dalam pemikir strukturalisme, poststrukturalisme, modernisme, posmodern, bidang filsafat, bidang budaya, sosiologi,

*) Nurhadi adalah dosen Jurusan PBSI, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang Yogyakarta.

ataukah bidang epistemologi, atau sejumlah kategori lainnya.

Terhadap buku *Transpolitika* karya Yasraf A. Piliang juga terjadi hal yang serupa. Pihak toko buku mengkategorikan buku ini sebagai buku politik kemudian memasukkan buku ini ke kelompok rak buku politik bukan pada kelompok buku budaya. Pihak toko buku tidak keliru memasukkan buku ini dalam kategori buku politik karena memang membahas permasalahan politik, hanya Yasraf bukanlah pengamat politik. Dosen Seni Rupa ITB ini pakar kajian budaya atau *cultural studies*, dan buku ini lebih sebagai buku kajian budaya terhadap perkembangan politik yang mutakhir, perkembangan realitas politik yang telah melampaui realitasnya, perkembangan politik dalam era virtualitas. Buku ini bukanlah buku kajian politik seperti umumnya dipaparkan oleh para ahli politik. Oleh penerbitnya, buku ini dikatakan sebagai sebagai buku politik pertama di Indonesia yang menggunakan pendekatan *cultural studies*.

Buku ini sebetulnya tidak hanya membahas permasalahan politik dari segi *cultural studies*, tetapi juga dengan metode semiotika, dan fenomenologi-hermeneutika. Sebagaimana diungkapkan oleh

Yasraf (2005:xxxiii-xxxiv), buku ini merupakan upaya untuk menafsirkan fenomena-fenomena budaya politik—terutama aktor-aktor politik—dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan *cultural studies* dipakai untuk mengungkapkan makna kultural di balik berbagai tindakan aktor-aktor politik serta citra representasinya dalam berbagai media, khususnya media komunikasi politik dalam era virtualitas dewasa ini. Metode semiotika digunakan untuk memahami struktur (atau perubahan) tanda, kode, dan makna di dalam berbagai penggunaan bahasa dan pertandaan di dalam wacana politik. Sementara metode fenomenologi-hermeneutika digunakan untuk menafsirkan hakikat dari berbagai fenomena politik itu, khususnya dalam menafsirkan maknanya yang lebih dalam menyangkut relasinya dengan pengalaman dan kesadaran manusia.

Dalam artikel ini akan dibahas permasalahan dunia politik dalam kaitannya dengan sektor-sektor lain seperti hukum, ekonomi, agama, media, dunia hiburan, seksualitas, dan aspek lainnya dalam melakukan pengkonstruksian citra terhadap dirinya. Citra politik itu seringkali pada periode posmodern ini muncul dalam bentuk posrepresentasi yang

berbentuk virtual imago (melalui mekanisme jaringan komputer) yang tidak memiliki representasinya dalam dunia nyata (karena berupa simulakra). Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran Yasraf A. Piliang tentang politik dalam konteks tersebut dari kajian semiotika, cultural studies, dan fenomenologi-hermeneutika dalam bukunya yang berjudul *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*.

2. Isi Buku

Dalam epilognya, Yasraf menyatakan bahwa dunia politik menampilkan dirinya dalam berbagai wujud penampakan: kebenaran, kepalsuan; permukaan, kedalaman; kejujuran, absurditas, esensi, dan ironi. Diperlukan metafora untuk memahami makna berbagai penampakan politik yang saling bertentangan itu. Makna politik, menurut alumnus *Central Saint Martins College of Art and Design*, London ini, dapat dibentangkan melalui metafora cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang memberikan penerangan, semacam pelita yang mengantarkan manusia guna mendapatkan pencerahan.

Cahaya adalah sumber penerangan dalam kegelapan meskipun

efek penerangan itu sangat bergantung pada intensitasnya, yakni tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Iluminasi atau pencerahan (*insight*) hanya dapat diperoleh dalam intensitas cahaya yang tepat. Begitu pun intensitas cahaya politik yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mengakibatkan ketaktampakan (*visionless*) ataupun kebutaan politik. Dunia politik adalah dunia yang sangat bergantung pada cahaya itu, yang di dalamnya orang berbicara tentang pandangan (*vision*), pencerahan, atau iluminasi politik.

Dunia politik pada abad informasi ini merupakan sebuah dunia yang dikelilingi oleh sorotan lampu pijar citra penampakan yang menusuk mata, yang dengan kilaunya membuat buta setiap orang yang menatapnya dan akhirnya menggiringnya ke dalam kondisi ketidakmelihatan. Inilah politik di dalam dunia kepenuhan: kepenuhan tanda, citra, *repertoire*, gaya, trik, komunikasi, informasi, meskipun kepenuhan itu sekaligus adalah kekosongan: kekosongan makna, ketiadaan kedalaman, dan kehampaan nilai-nilai.

Dunia politik kini dipenuhi oleh berbagai bentuk citra penampakan luar, yang menciptakan ada politik

sebagai ontologi citra (*being images*). Ada dalam wujud citra itu adalah ada yang ironis—ada yang sekaligus ketiadaan. Politik ada dalam wujud citra, tetapi citra itu sekaligus merupakan selubung penutup dari keberadaan yang sebenarnya. Penampakan luar politik (berupa citra) adalah bentuk keberadaan yang bersifat *menyembunyikan*. Menurut Yasraf, melalui berbagai strategi penampakannya yang mempesona, politik citra seakan-akan berpretensi menampilkan kebenaran, padahal penampakannya itu adalah penampakan halusinasi yang menyesatkan (halaman 382).

Bagi pembaca buku-buku Yasraf, tema ini bukanlah hal yang baru. Dalam buku-bukunya yang terdahulu seperti: (1) *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, (2) *Sebuah Dunia yang Menakutkan*, (3) *Hipermoralitas: Mengadili Bayang-bayang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*, (4) *Hipерsemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, (5) *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, ataupun (6) *Dunia yang Berlari: Mencari "Tuhan-tuhan" Digital* tema semacam ini pernah dibahas. Subjudul bukunya yang pertama, *Dunia yang Dilipat: Tamasya*

Melampaui Batas-batas Kebudayaan, mengingatkan kita akan buku Umberto Eco yang pernah diindonesiakan: *Tamasya dalam Hiperealitas* (2004).

Ketajaman analisis atas tema-tema kajian posmodern yang dilakukan Yasraf inilah yang melatarbelakangi penerbit Jalasutra menerbitkan kembali buku *Dunia yang Dilipat* (sebelumnya diterbitkan oleh Mizan, 1998), dan *Hipersemiotika* (revisi dari edisi sebelumnya yang berjudul *Hiper-realitas Kebudayaan*, diterbitkan oleh LKiS, 1999) yang kemudian disusul dengan buku *Posrealitas* (2004). Buku *Transpolitika* merupakan buku keempat Yasraf yang diterbitkan oleh Jalasutra. Baik dalam *Dunia yang Dilipat* (Piliang, 1998), *Hipersemiotika* (Piliang, 2003), *Posrealitas* (Piliang, 2004), maupun dalam bukunya yang lain, penulis kelahiran Maninjau 1956 ini mengupas fenomena-fenomena kekinian, fenomena virtualitas dan interpretasi di baliknya yang tidak lagi sederhana dan linear. Ada suatu strategi tersendiri untuk “membaca” fenomena posmodern.

Meski buku *Transpolitika* ini terkesan mengupas hal-hal yang pernah dibicarakan sebelumnya,

Yasraf menampilkan tema-tema tersebut sehingga saling melengkapi dan memperdalam topik-topik dalam kajian posmodern atau *cultural studies*. Pengulangan pembicaraan topik-topik tertentu dalam buku ini juga tidak membuat pembaca menjadi jenuh, melainkan malah makin mengerti sehingga frame keseluruhannya dapat dipahami.

Buku *Transpolitika* ini terbagi atas tiga bagian: (1) Paranoia Politik, (2) Imoralitas Politik, dan (3) Genealogi Politik. Selain itu, Yasraf juga menyertakan dua tulisan sebagai prolog (*Transpolitika: Budaya Politik di dalam Era Virtualitas*) dan epilog (*Minimalisme Politik: Iluminasi Politik di dalam Era Virtualitas*). Bagian I: Paranoia Politik terdiri atas lima subbab, yaitu: (a) Horror-culture: Politik Kebudayaan dan Kekerasan, (b) *Politicum Horribilis*: Politik Horor dan Kekerasan Massa, (c) Kekuasaan dan Kekerasan: Politik dan Kekuatan Horor, (d) *Symbolicum Horribilis*: Bahasa, Politik, dan Kekerasan, dan (e) Kreativitas Destruktif: Anak Bangsa dalam Politik Kekerasan.

Bagian II: Imoralitas Politik juga terdiri atas lima subbab, yaitu: (a) Nomadisme dan Imoralitas Politik: dari Absurditas hingga Skizofrenia, (b) Parodi Politik Posmodern: Ada

Sebuah Negeri, Hobi Warganya Kolusi, (c) Kekuatan Simbol: Bahasa, Politik, dan Nasionalisme, (d) Media dan Depolitisasi: Kebenaran dalam Kegagalan Informasi, dan (e) Kekuasaan dan Media: Politik dan Kekerasan Simbolik.

Bagian III: Genealogi Politik terdiri atas delapan subbab, yakni: (a) Minimalisme Ruang Publik: Budaya Publik di dalam Abad Informasi, (b) Politik dan Pengetahuan: Pendidikan di dalam Era Kapitalisme Global, (c) Genealogi Politik: Masa Depan Imajinasi Bangsa, (d) Dialog Multikultural: Otonomi dan Komunikasi Antarbangsa, (e) Demokrasi Dialogis: Komunikasi Politik di dalam Era Informasi, (f) Politik Neopluralisme: Belajar dari Pluralisme Becil, (g) Politik Heteronomi: Pemikiran Ulang tentang Konsep Otonomi, dan (h) Politik Perubahan: Undang-undang dan Perubahan Budaya.

3. Pembahasan

Dengan analisis- analisisnya ini, Yasraf sebenarnya menengarai momen-momen kebenaran yang telah digantikan oleh citraan-citraan sehingga politik akhirnya terperangkap di dalam permainan bebas citra dan teks. Dengan

demikian, politik telah kehilangan pondasinya. Penciptaan citra dan manipulasi teks dilakukan demi kekuasaan murni dengan menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Inilah komentar Haryatmoko terhadap buku Yasraf ini dalam kata pengantarnya (halaman xxviii).

Lebih lanjut Haryatmoko menyatakan bahwa buku ini yang dengan jitu menggunakan kata “*Transpolitika*” sebagai judulnya, sebenarnya akan mengungkapkan empat hal. Pertama, persilangan politik dan media, politik dan dunia hiburan, politik dan seksualitas. Kedua, perselingkuhan antara politik dan hukum, politik dan ekonomi, komiditi dan agama; aspek inilah yang akan menjelaskan premanisme ekonomi, imagologi hukum, citra keadilan, komersialisasi hasrat, dan populerisme agama. Ketiga, istilah “*transpolitika*” juga ingin memberi ilustrasi dunia yang tidak mengenal sekat-sekat lagi antara ruang publik dan privat, dunia anak dan orang dewasa, batas laki-laki dan perempuan, pencairan disiplin, dan pembongkaran kategori. Keempat, tidak bisa dibedakan lagi antara otentisitas dan artifisial, figur yang berdasarkan imagologi dan rekayasa elektro-digital, identitas politik bersifat jamak dan mengapung.

Yasraf dengan sangat jeli membidik tema ini dari aspek yang menjadi motor penggerak era virtualitas (yang mengandalkan tanda dan citra), yaitu media massa. Haryatmoko mengapresiasi buku ini sebagai hasil kerja keras dan ketekunan dari seorang ahli posmodernisme, sebuah kajian di mana tidak semua orang memahaminya.

Transpolitika berarti persilangan dan simbiosis prinsip, cara, dan strategi politik dengan prinsip, cara, dan strategi bidang-bidang lain di luarnya seperti media, budaya populer, dan seksualitas, yang membuat kabur prinsip politik itu sendiri. *Transpolitika* atau perselingkuhan politik ini dimungkinkan terbentuk karena longgar atau lenturnya batas-batas yang selama ini memisahkan berbagai segmentasi dunia kehidupan. Dengan mengutip karya Giles Deleuze dan Felix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia*, Yasraf menyatakan adanya segmentasi-segmentasi tersebut. Pertama, segmentasi linier, yaitu segmentasi berdasarkan pembagian garis lurus, dari satu ruang ke ruang lainnya secara vertikal mengikuti alur atau panah waktu; misalnya pembagian alur hidup dari lahir, anak-anak, sekolah, dewasa, bekerja, berumah

tangga, mempunyai anak, menua dan akhirnya meninggal. Kedua, segmentasi sirkuler, yaitu segmentasi mengikuti model sirkuler yang terbentuk atas daerah pusat, lingkaran dalam, lingkaran luar, dan seterusnya; misalnya pembagian wilayah menjadi pusat, suburban, pinggiran, luar kota, dan seterusnya. Ketiga, segmentasi horizontal, yaitu segmentasi berdasarkan prinsip pembagian bidang datar; misalnya pembagian rumah berdasarkan kamar-kamar, pembagian negara menjadi propinsi-propinsi, dan seterusnya (halaman 5).

Keterbukaan, kebebasan, dan transparansi yang mewarnai dunia dewasa ini telah memperkaya permainan yang ditawarkannya, telah menciptakan semacam pergerakan ke dalam berbagai bentuk pencampuran, persenyawaan, hibridasi, amalgamisasi, yang membentuk transpolitika. Perkawinan silang di antara berbagai entitas tersebut menghasilkan berbagai bentuk hibrid. Hibriditas ini tentunya tidak hanya pada tingkat fisik, tetapi juga pada tingkat simbolik. Misalnya, polisi hibrid, yaitu polisi yang secara semiotik mengombinasikan tanda-tanda positif pengabdian, perlindungan, dan loyalitas dengan tanda-tanda negatif penipuan, pemerasan, dan pencurian. Ada

politisi mutan, yaitu politisi yang telah berubah wujud menjadi seorang pedagang, yaitu memperdagangkan ide-ide politik dalam rangka mendapatkan kekayaan ekonomi, bukan kedudukan politik semata. Dunia politik kontemporer dibentuk oleh berbagai bentuk pelintasan, persilangan, persinggungan, bahkan percampuran dari beberapa dunia di dalam dunia yang sama, yang membentuk kategori-kategori dunia baru yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Ada tiga tataran yang menjadi landasan dunia politik yang secara bersama-sama membangun budaya politik era informasi dewasa ini. Pertama, tataran ideologi atau yang disebut oleh Karl Marx sebagai superstruktur, yaitu dunia ide, gagasan, konsep, kepercayaan, dan keyakinan politik, yang menjadi fondasi dari setiap tindakan politik. Meski dengan catatan, relasi produksi di era informasi ini tidak lagi terikat dengan infrastrukturnya (dasar), melainkan telah menjadi sebuah dunia abstrak yang telah terlepas sebagian dari relasi produksi. Kedua, tataran tanda, yaitu tataran pengemasan ide, gagasan, konsep, atau keyakinan politik ke dalam wujud tanda dan citra sebagai bagian dari dunia komunikasi politik. Orang kini

meyakini bahwa dunia tanda dan citra itu menjadi dunia otonom yang terlepas dari dunia nyata. Tentang hal ini Yasraf membeberkannya secara panjang lebar dalam bukunya terdahulu: *Posrealitas* (Piliang, 2004).

Ketiga, tataran realitas, yaitu dunia nyata tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial-ekonomi, yang dalam skema ideologi Karl Marx disebut sebagai dasar atau dunia relasi produksi. Pada abad kapitalisme digital dewasa ini, dunia dasar atau produksi dan dunia ideologi adalah dunia yang dapat terpisah sama sekali karena ideologi itu kini dapat diproduksi pada tataran citra melalui sebetuk permainan citra dan tanda. Otomatisasi dunia permainan, manipulasi dan simulasi tanda ideologi tersebut menciptakan sebuah relasi yang selalu dibelokkan dan didistorsi arahnya oleh mekanisme permainan tanpa henti antara produser ideologi dan produser tanda-tanda sehingga tidak pernah mencapai sebuah realitas konkret. Ide-ide ideologis tentang ekonomi yang berpihak pada rakyat yang ditawarkan di dalam pasar kampanye politik, hanya berhenti sebagai permainan ide dan tanda semata, karena sistem ekonomi yang berjalan tetap merupakan ekonomi yang berpihak pada pemodal besar. Kemasan ide-ide

tidak mampu mengubah realitas, disebabkan ia menjadi sebuah dunia otonom, yaitu zona otonom semiotik yang telah kehilangan kontak dan konteks dengan realitas (halaman 13).

Dengan mengutip *The Mass Marketing of Politics* karya Bruce Newman, Yasraf melukiskan dunia politik di abad informasi ini dengan melihat fenomena presiden-presiden Amerika Serikat. Beberapa presiden Amerika Serikat tergolong master dalam pembangunan citra dirinya, mulai dari produksi foto-foto diri yang dikondisikan selalu berdiri di depan simbol-simbol patriotik seperti bendera, *gesture*, dan ucapan kata-kata yang digunakan untuk merangkul hati rakyat. Citra-citra tersebut pada umumnya tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya, melainkan distorsi atas realitas tersebut.

Kekuatan ide dalam konstelasi dunia politik menurut Yasraf, sambil mengutip pemikiran Antonio Gramsci, merupakan hal yang penting. Dunia politik tidak hanya ruang tempat lalu lalang entitas-entitas fisik dan psikis, tetapi yang lebih penting lagi adalah ide, gagasan, atau konsep. Politik tidak saja bagaimana tubuh, materi, dan objek (sumber daya fisik, senjata)

dimobilisir dalam rangka mendapatkan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ide-ide diproduksi, dieksplorasi, dimani-pulasi, direkayasa, dan dimobilisasi dalam rangka memenangkan penerimaan publik, memperoleh hegemoni. Politik lebih merupakan arena perang kekuatan ide daripada perang kekuatan fisik dan material. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah dari mana sumber ide tersebut dan bagaimana ia diproduksi (halaman 22).

Dalam melukiskan kekuatan ide dari konsep hegemoni ini, Yasraf di bagian lain melanjutkannya dengan kekuatan simbolik, suatu konsep yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (Harker, 2005:225). Kekuatan simbolik adalah kekuatan tak tampak—dan bersifat distorsif—tetapi diakui sebagai legitimated. Menurut, kekuatan simbolik adalah apa yang menciptakan kekuatan kata-kata dan slogan, sebuah kekuatan yang mampu mempertahankan atau mensubversi tatanan sosial, yaitu kepercayaan akan legitimasi kata-kata dan orang yang mengucapkannya.

Sebuah bahasa atau simbol dianggap *legitimated* atau *illegitimated* sangat bergantung pada siapa yang mengucapkannya (halaman 235).

Dalam kasus perang Timor-Timur, bila yang mengucapkan kata-kata adalah Perdana Menteri Australia John Howard yang memiliki otoritas PBB, kata-katanya dianggap legitimed. Sebaliknya, bila yang mengucapkan sebuah kata adalah kelompok pro-integrasi atau TNI, kata-kata tersebut tidak mempunyai kekuatan legitimasi karena tidak ada legitimasi dunia internasional. Dengan kekuatan simbol tersebut, Australia memiliki otoritas untuk mengkonstruksi realitas kekerasan di Timor Timur. Dengan otoritas itu pula ia melakukan semacam kekerasan simbol dengan cara mendefinisikan realitas Timor Timur—lewat berbagai media massa—sesuai dengan kriteria mereka sendiri yang dilegitimasi dunia internasional seperti definisi dan konstruksi realitas: milisi sebagai pembantai (*thugs*), orang biadab (*savages*), binatang (*animals*), harus darah, *genocide*, amok, dan sebagainya (halaman 236—237).

Kelompok pro-integrasi, TNI, dan pemerintah Indonesia—lewat media lokal—juga berupaya mendefinisikan realitas dengan landasan ideologi dan kriteria-kriteria mereka sendiri seperti: Australia (UNAMET) sebagai orang curang, licik, agresor, oportunist, atau munafik. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai modal simbolik dan kekuatan simbolik (terutama legitimasi internasional) dalam mengubah konstruksi realitas yang mereka anggap penuh kepalsuan dan ketidakadilan. Dalam hal ini, modal simbolik dan legitimasi yang diperolehnya dapat menjadi kekuatan pendefinisi realitas, meskipun realitas yang didefinisikan itu adalah realitas yang bersifat palsu dan distorsif. Realitas kekerasan di Timor Timur yang terlanjur tampil dalam wajahnya yang terdistorsi menunjukkan peran kekuatan simbol atau kekuatan kata-kata dalam membentuk atau mengubah lukisan dunia.

Dalam hal ini, hegemoni Australia dalam mendefinisikan realitas Timor Timur diperoleh dengan cara kekerasan simbolik. Apa yang disajikan oleh media sebagai alat hegemoni bukanlah gambaran realitas, tetapi versi realitas, yakni realitas yang telah terdistorsi, bahkan bertentangan dengan realitas yang

sesungguhnya. Versi realitas inilah yang oleh Jean Baudrillard dalam *The Gulf War did not Take Place* disebutnya sebagai simulakra, topeng realitas, kamufase realitas, atau hiperealitas (halaman 238—239).

Berdasarkan mekanismenya, ada tiga model produksi ide di dalam dunia politik. Pertama, presentasi, yang di dalamnya aktor-aktor politik menggunakan tubuh, lingkungan, dan objek-objek fisik dalam rangka menggolongkan kekuatan politik seperti melalui arak-arakan, pengerahan massa, pidato politik. Kedua, representasi, yaitu penggunaan berbagai bentuk media representasi guna merepresentasikan ide kekuatan politik yang tidak dapat dihadirkan. Contohnya, representasi seorang tokoh politik dalam poster, atau representasi partai di dalam brosur. Ketiga, posrepresentasi, yaitu pembentukan ide politik sebagai ide murni melalui teknologi media mutakhir (khususnya media elektronik dan digital), dalam pengertian citra yang ditampilkan (di dalam layar TV, komputer, film) yang tidak lagi merepresentasikan realitas fisik di luarnya, melainkan dibentuk berdasarkan ide-ide murni di dalam layar itu sendiri. Tiga model produksi ide dalam dunia politik dapat digambarkan dalam skema berikut.

Ideisasi	Bentuk	Ontologi	Epistemologi
presentasi	logos	present	true
representasi	imago	represent	truth
posrepresentasi	virtual imago	absent	untruth

Di dalam abad virtual, ketika ide-ide politik telah dikontaminasi oleh ide-ide budaya populer, ide hegemoni tersebut menggiring pada distorsi atau penyimpangan ideologis karena motif pembentukan keyakinan politik yang melandasi wacana politik, kini digantikan oleh motif-motif hiburan, daya pesona (*fetishism*), dan kepuasan (*libidinal*), yang merupakan karakteristik budaya populer. Ruang publik adalah sebuah (elektronik) agora, yang di dalamnya berlangsung perang bahasa atau perang simbol secara terus-menerus, dalam rangka memperebutkan penerimaan publik atas gagasan-gagasan ideologis yang diperjuangkan. Di dalam abad informasi dan globalisasi, agora telah menjelma menjadi tempat berlangsungnya medan perang virtual. Menurut Louis Althusser, cara sebuah ideologi mencari pengikutnya adalah melalui mekanisme ajakan atau interpelasi, bukan lewat kekuatan senjata. Untuk dapat mereproduksi dirinya, sebuah ideologi harus memanggil subjeknya secara simpatik (halaman 28).

Konsep virtualitas dalam konteks politik tidak hanya dipahami sebagai sifat kemayaan yang tercipta akibat mekanisme jaringan komputer (*cyberspace*), tetapi melingkupi konsep maya dalam pengertian yang

lebih luas, yang tercipta di dalam ruang-ruang televisi, film, video, dan media komunikasi publik lainnya. Kini sebuah migrasi politik besar-besaran tampaknya tengah berlangsung di dalam dunia politik, yaitu migrasi kehidupan politik dari ruang nyata ke dalam ruang-ruang virtual. Dunia virtual, sebagaimana dikatakan oleh Michel Hardt & Anthony Negri, merupakan dunia yang melampaui ukuran, dalam pengertian bahwa tidak ada mekanisme yang dapat mengukur kekuatan, nilai, atau batas yang hanya mungkin dilakukan di dalam dunia yang mempunyai batas-batas. Politik yang dibangun di dalam ruang semacam ini adalah politik tak bertempat (*deteritorial politics*), yang di dalamnya teritorial fisik tidak lagi menentukan kekuasaan politik (halaman 30).

4. Implikasi

Pembicaraan politik pada masa virtualitas ini tidak hanya disampaikan oleh Yasraf A. Piliang, di Indonesia esais seperti Goenawan Mohamad seringkali dalam sejumlah Catatan Pinggir-nya di majalah *Tempo* juga membicarakan hal yang sama. Menurut Goenawan seraya mengutip Milan Kundera, dalam era *imagologi* dewasa ini, imaji mengalahkan realitas, juga mempermainkan tekno-

logi, dan menentukan kemenangan dan kekalahan (Mohamad, 2006:109).

Televisi telah membuat sejarah jadi satu seri tontonan. Jurnalisme jadi aksi tersendiri. Peliputan nonstop 24 jam seperti yang dilakukan CNN harus dibuat tak membosankan. Menurut Goenawan, kita pun akhirnya terpukau. Juga merasa aman. Bom menggelegar, api berkobar, tapi selalu dengan jarak yang cukup—seakan-akan di sana tak ada kekejaman. Kekejaman itu sendiri telah mengalami perubahan. Dulu orang Roma datang ke amfiteater menonton adu gladiator. Mereka asyik menyaksikan leher seseorang ditusuk tombak, darah muncrat, dan yang tewas memekik.

Kini di televisi, tak terdengar teriakan apa pun. Tak ada bau jangat terbakar oleh api mesiu, tak ada sepotong kaki yang terkena misil dan terlontar ke langit-langit sebuah gedung. Jurnalisme TV—”*medium cool*” kata McLuhan—menyisihkan kita dari deru dan debu sejarah. Aksi kekerasan di medan perang merupakan suguhan yang dapat

dipantau di depan televisi sambil makan camilan. Akan tetapi, melalui media seperti televisi, representasi politik dibentuk atau dikonstruksi. Oleh karena itu, *sudut pandang* yang dipergunakan CNN berbeda dengan yang dipergunakan *Al-Jazeera*. Peperangan tidak hanya terjadi di Bagdad antara tentara Amerika dan sekutunya melawan gerilyawan Irak, tetapi juga di balik masing-masing redaksi seperti CNN ataupun *Al-Jazeera* (Mohamad, 2006:411).

Buku semacam *Trans-politika* karya Yasraf A. Piliang dan juga informasi-informasi semacam artikel Goenawan Mohamad merupakan kajian yang sangat korelatif dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan mengglobal sekarang ini, dunia yang semakin virtual dengan mementingkan penonjolan citra. Buku ini sangat bagus untuk dikaji guna memahami perkembangan dunia terkini, khususnya dalam dunia politik secara umum. Meski harus ditambahkan sejumlah buku Yasraf sebelumnya ataupun Catatan Pinggir-nya Goenawan juga menjadi referensi yang bagus bagi buku-buku terbitan penulis Indonesia. Yasraf selangkah lebih dahulu memahami kajian semacam ini, seperti halnya Goenawan, meski selangkah itu seringkali sama dengan satu dekade.

Selain mengusung sejumlah pemikir posmodern ataupun *cultural studies*

seperti Baudrillard, Bourdieu, Barthes, Eco, Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, Jencks, Kristeva, Strauss, Lacan, Rorty, Heidegger, Arendt, Althusser, Adorno, Bataille, Lyotard, Gramsci, dan seabrek pemikir lainnya, Yasraf mampu menuliskan pemikiran-pemikiran tokoh dunia tersebut dalam konteks pembicaraan yang tepat dan mudah dipahami. Yasraf dapat dikatakan telah menjadi jembatan bagi pembaca Indonesia yang ingin mendalami posmodern ataupun *cultural studies*. Indeks, baik indeks nama diri maupun indeks istilah dan subjek, yang dilampirkan pada akhir buku ini merupakan sarana yang mempermudah pembaca untuk mencari nama-nama tertentu atau istilah-istilah tertentu dalam buku ini. Tidak sedikit buku di Indonesia terbit tanpa indeks.

5. Simpulan dan Saran

Sebagai kesimpulan, apa yang telah dikemukakan pada bagian depan mengenai politik pada era virtualitas ini dapat diwakili oleh apa yang ditulis Yasraf pada halaman 382. Dunia politik pada era virtualitas dipenuhi oleh berbagai bentuk citra penampakan luar, yang menciptakan ada politik sebagai ontologi citra (*being images*). Ada dalam wujud citra itu adalah ada yang ironis—ada yang sekaligus ketiadaan. Politik ada dalam wujud citra, tetapi citra itu sekaligus merupakan selubung penutup dari keberadaan yang sebenarnya. Penampakan luar politik (berupa citra) adalah bentuk keber-adaan yang bersifat *menyembunyi-kan*. Menurut Yasraf, melalui berbagai strategi penampakannya yang mempesona, politik citra seakan-akan berpretensi menampilkan kebenaran, padahal penampakannya itu adalah penampakan halusinasi yang menyesatkan.

Buku ini sangat bagus dan menarik untuk dikaji. Selain menampilkan situasi perpolitikan masa kini dalam segala konteks jejaringnya, buku ini mengupas permasalahan tersebut dari kajian ilmu-ilmu humaniora. Tidak salah jika para mahasiswa ataupun praktisi ilmu humaniora menjadikan buku ini sebagai referensi utama. Juga bagi segenap pemerhati perpolitikan dan berbagai persoalan kekinian guna mengetahui apa yang ada di balik fenomena yang melingkupi kita akhir-akhir ini.

Daftar Pustaka

- Eco, Umberto. 2004. *Tamasya dalam Hiperealitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, dan Chris Eilkes (ed.). 2005. *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (penerj. Pipit Maizier). Yogyakarta: Jalasutra.
- Mohamad, Goenawan. 2006. *Catatan Pinggir 6*. Jakarta: Pusat Data Analisa Tempo.
- Piliang, Yasraf A. 1998. *Sebuah Dunia yang Dilipat*. Bandung: Mizan.
- Piliang, Yasraf A. 1995. *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____, 2003. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____, 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Identitas Buku : Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas
Pengarang : Yasraf A. Piliang
Penerbit : Jalasutra, Yogyakarta
Tahun : 2005 (cetakan I)